



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LKjIP.

Dengan selesainya penyusunan LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Terakhir kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan LKjIP ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Tanjung Pati Maret 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd
NIP. 19720923 200212 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN WEWENANG	1
C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	5
D. ISU-ISU STRATEGIS	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPPKBPPPA	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA	17
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA	19
C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA	19
D. ANALISIS EFISIENSI	36
E. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV : PENUTUP	46
Lampiran	
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Prestasi yang diperoleh Tahun 2022	

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	: Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan	21
Gambar III. 2	: Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang	21
Gambar III. 3	: Pelatihan Ladies Program untuk anggota DWP	22
Gambar III. 4	: Peningkatan SDM Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	22
Gambar III. 5	: Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (1)	26
Gambar III. 6	: Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2)	26
Gambar III. 7	: Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (3)	27
Gambar III. 8	: Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (4)	27
Gambar III. 9	: Workshop Penerapan Kode Etik Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi	27
Gambar III. 10	: Sosialisasi Anti Perundungan di Sekolah	28
Gambar III. 11	: Audit kasus stunting (1)	30
Gambar III. 12	: Audit kasus stunting (2)	31
Gambar III. 13	: Mini Lokakarya	31
Gambar III. 14	: Penyuluhan bagi calon pengantin	31
Gambar III. 15	: Pendampingan TPK Baduta	32
Gambar III. 16	: Pendampingan TPK Ibu Hamil	32
Gambar III. 17	: Pelayanan KB MKJP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP2KBP3A Tahun 2022	6
Tabel 2	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP2KBP3A Tahun 2022	6
Tabel 3	:	Jumlah Sarana dan Prasarana di DP2KBP3A Tahun 2022	7
Tabel 4	:	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022	16
Tabel 5	:	Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2022	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	:	Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 sampai dengan 2022	20
Grafik 2	:	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2021 sampai dengan 2022)	23
Grafik 3	:	Rasio Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021 sampai dengan 2022	24
Grafik 4	:	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022	28
Grafik 5	:	Nilai AKIP OPD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022	35

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 8.544.850.621,- (Delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan 9 program, dan 22 kegiatan serta 47 sub kegiatan.

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.062.346.847,- (Tujuh milyar enam puluh dua juta tiga tarus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 82,65% dan realisasi fisik sebesar 90,15%. Pada tahun 2022 realisasi keuangan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 86,88% dan realisasi fisik dapat dicapai 100% Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja, dibandingkan tahun 2021 (79,52%) maka rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu 118,86% dengan predikat sangat tinggi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2022. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2021-2026 dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan sasaran RPJMD 2021-2026 dan Indikator Kinerja 2021-2026.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DP2KBP3A menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.
 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga
Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
 4. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan
Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah sub bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga serta data dan informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

C.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DP2KBP3A Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMA Sederajat	0	1	1
2	D3	0	8	8
3	D4	0	3	3
4	S1	4	10	14
5	S2	1	1	2
	Total	5	23	28

Adapun Susunan Kepegawaian pada DP2KBP3A terdiri dari pejabat Struktural yaitu, 1 orang Sekretaris merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang sub koordinator, 1 orang kepala UPTD, 1 orang kepala TU UPTD dan fungsional umum sebanyak 8 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DP2KBP3A Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	2	19	21
3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	5	23	28

C.2. Sarana dan Prasarana

Beberapa jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Tabel 3.
Jumlah Sarana dan Prasarana
di DP2KBP3A Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	267,2 m ²
2	Bangunan tempat ibadah	42 m ²
3	Bangunan BP KB Kec. Kapur IX	50 m ²
4	Bangunan BP KB Kec. Guguak	50 m ²
5	Bangunan BP KB Kec. Payakumbuh	50 m ²
6	Bangunan BP KB Kec. Suliki	50 m ²
7	Bangunan BP KB Kec. Gunuang Omeh	50 m ²
8	Bangunan BP KB Kec. Bukik Barisan	50 m ²
9	Bangunan BP KB Kec. Pangkalan Koto Baru	50 m ²
10	Bangunan BP KB Kec. Situjuah Limo Nagari	50 m ²
11	Bangunan BP KB Kec. Lareh Sago Halaban	50 m ²
12	Bangunan BP KB Kec. Luak	50 m ²
13	Bangunan BP KB Kec. Harau	50 m ²
14	Bangunan BP KB Kec. Akabiluru	50 m ²
15	Bangunan BP KB Kec. Mungka	50 m ²
16	Kendaraan roda empat	10 unit
17	Kendaraan roda dua	79 unit
18	Komputer	20 unit
19	Laptop	35 unit
20	Printer	29 unit

D. ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DP2KBP3A
4. Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

3.1.2 Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum seluruh nagari memiliki data mikro
2. Masih tingginya jumlah keluarga yang termasuk kategori pra sejahtera dan KS1
3. Masih rendahnya upaya pemberdayaan kelompok UPPKS dan Tribina
4. Tingginya jumlah unmetneed
5. Tingginya jumlah perkawinan perempuan di usia bawah 20 tahun
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
7. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon berada di Pemerintah Pusat
8. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
9. Tingginya CPR tidak diikuti dengan penurunan persentase TFR

3.1.3 Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai kepala keluarga perempuan dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki
2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
11. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
13. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilih

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi
2. Masih tingginya jumlah keluarga kategori PS dan KS1 dan belum seluruhnya masuk kedalam basis pendataan keluarga
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok UPPKS dan tribina dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

4. Belum optimalnya tingkat pelayanan dan penggunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat
5. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
6. Tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)
7. Belum optimalnya peran kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
8. Masih rendahnya kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga
9. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
10. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
11. Belum optimalnya kelembagaan PUG
12. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilah
13. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
14. Belum optimalnya peran kelembagaan pengembangan Kabupaten Layak Anak.
15. Belum optimalnya kelembagaan di daerah dalam mengimplementasikan Kabupaten Lima Puluh Kota Layak Anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan wewenang, sumber daya aparatur, isu-isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tahun 2022.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, analisis efisiensi anggaran dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPPKBPPA

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

DP2KBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Permasalahan Terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DP2KBP3A
4. Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

1. Belum seluruh nagari memiliki data mikro
2. Masih tingginya jumlah keluarga yang termasuk kategori pra sejahtera dan KS1
3. Masih rendahnya upaya pemberdayaan kelompok UPPKS dan Tribina
4. Tingginya jumlah unmetneed
5. Tingginya jumlah perkawinan perempuan di usia bawah 20 tahun
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
7. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon berada di Pemerintah Pusat
8. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
9. Tingginya CPR tidak diikuti dengan penurunan persentase TFR

Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Masih rendahnya OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender
2. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai kepala keluarga perempuan dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki
3. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
4. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
5. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
6. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
8. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

9. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
10. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
11. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
12. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
13. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
14. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 DPPKBPPPA diharapkan berperan dalam mewujudkan misi ke 1 (satu) dan misi ke 4 (empat).

Terkait RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sangat mendukung pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala

daerah. Pada Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut ditetapkan dengan Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, tujuan berikutnya adalah Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan sasaran Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut ditrtapkan dengan Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan di atas yaitu pertama melalui penguatan pada kebijakan dan regulasi terhadap peran gender, perlindungan anak dan perempuan, dengan kebijakan yang ditempuh dalam mendukung strategi di atas berfokus pada meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender. Kedua melalui penurunan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan kebijakan yang ditempuh fokus pada menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketiga strategi dengan memenuhi seluruh indikator dalam penilaian KLA, dengan kebijakan difokuskan pada pemenuhan indikator KLA.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut pada tahun 2022 DPPKBPPPA melaksanakan 9 program, 22 kegiatan dan 47 sub kegiatan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota untuk

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan dimana Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pihak Pertama dan Bupati Lima Puluh Kota sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0036
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0036
3.	Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	68
		4.2 Nilai IRB	16
		4.3 Nilai IKM	85

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa didalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator kinerja : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dan Rasio kekerasan terhadap anak
3. Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja : Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % - 90%	Tinggi
3.	66 % - 75%	Sedang
4.	51 % - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas, setelah membandingkan target kinerja dan reasilasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 ini berhasil sangat baik dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bisa diberi predikat **sangat tinggi** karena rata-rata realisasi kinerja dari 7 indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 adalah sebesar 118,86 %.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Anak Nomor : 540/30/KEP/DPPKBPPPA-LK/IX/2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, IKU DPPKBPPPA adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,77	95,80	95,85	95,90	95,95	96,00
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
	Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,27	1,25	1,20	1,1	0,95	0,95
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		68	68	69	69	70	70
	Nilai IRB		16	16	16	17	17	18
	Nilai IKM		85	85	85	85	85	85

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		Realisasi	% Capaian	Predikat	
		Satuan	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,80	95,05	99,22	Sangat tinggi
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0036	0,009	40	Sangat rendah
		Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,0036	0,13	2,8	Sangat rendah
3	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,25	0,71	176,06	Sangat tinggi
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		68	69	101,47	Sangat tinggi
		Nilai IRB		16	50	312,5	Sangat tinggi
		Nilai IKM		85	85	100	Sangat tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran strategis 1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

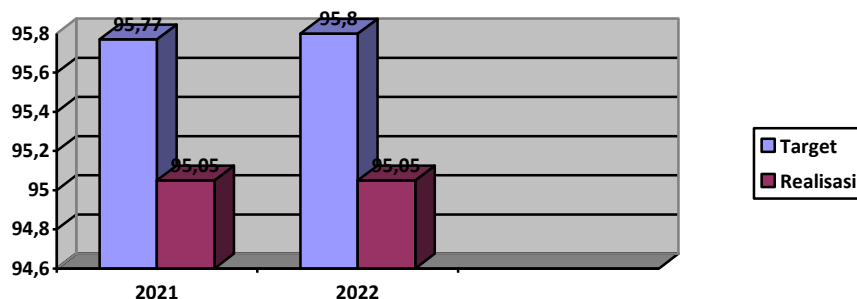
No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		95,77	95,05	95,80	95,05	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG), adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG ditentukan oleh berbagai faktor. Target pencapaian IPG tahun 2022 adalah sebesar 95,80% dan realisasi adalah 95,05% atau tercapai sebesar 99,22%

Grafik 1
Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun
2021 sampai dengan 2022



Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan pagu dana sebesar Rp. 5.857.500,-, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu dana Rp 2.622.500,- dan Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu dana Rp. 1.520.000. Dilaksanakan juga melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota, Sub

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu dana sebesar Rp. 239.000.000,- serta kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 10.000.000,-

Dokumentasi kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut diatas, sebagai berikut :

Gambar III.1
Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan



Gambar III.2
Peningkatan Kapasitas Bundo Kandung



Gambar III.3
Pelatihan Ladies Program untuk anggota DWP



Gambar III.4
Peningkatan SDM Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)



2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

No	Indikator Kinerja	Target RPJM D	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,004	0,005	0,0036	0,009	
2.	Rasio Kekerasan terhadap Anak		0,005	0,005	0,0036	0,13	

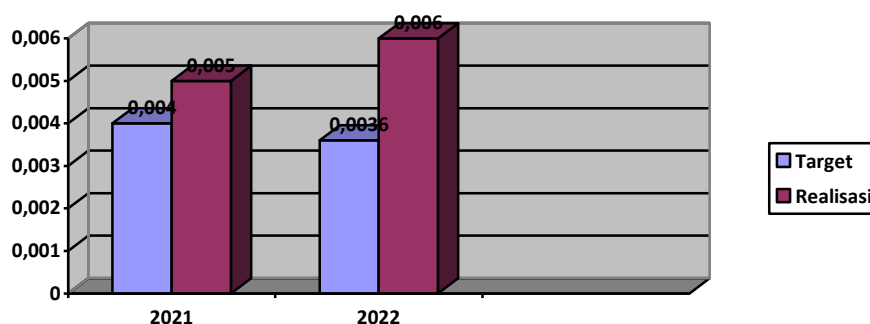
Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

- a. Indikator Kinerja 1 : Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), target tahun 2022 adalah 0,0036% realisasi 0,009 % atau tercapai sebesar 40 %.

Grafik 2

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Tahun 2021 sampai dengan 2022



Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan berjumlah 12 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual termasuk juga ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi (pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

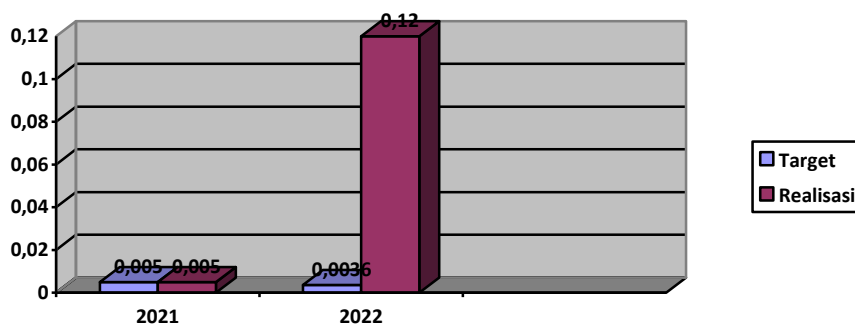
. Indikator kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 28.271.000, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 12.058.500, Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 26.278.000.

- b. Indikator Kinerja 2 : Rasio Kekerasan Terhadap Anak, target tahun 2022 sebesar 0,0036% dan realisasi sebesar 0,13 % atau tercapai 2,8%.

Grafik 3
Rasio Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021 sampai dengan 2022



Rasio kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 60 orang, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 43 orang. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 4.240.600, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 23.133.500, Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kotadengan pagu dana Rp. 74.763.000, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota dengan pagu dana Rp. 38.177.200, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 640.000, Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 2.100.000, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 2.750.000, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 1.108.800, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 530.000, Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 607.000.

Dokumentasi kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut diatas, sebagai berikut :

Gambar III.5
Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (1)



Gambar III.6
Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2)



Gambar III.7
Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (3)



Gambar III.8
Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (4)



Gambar III.9
Workshop Penerapan Kode Etik Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi



Gambar III.10
Sosialisasi Anti Perundungan di Sekolah



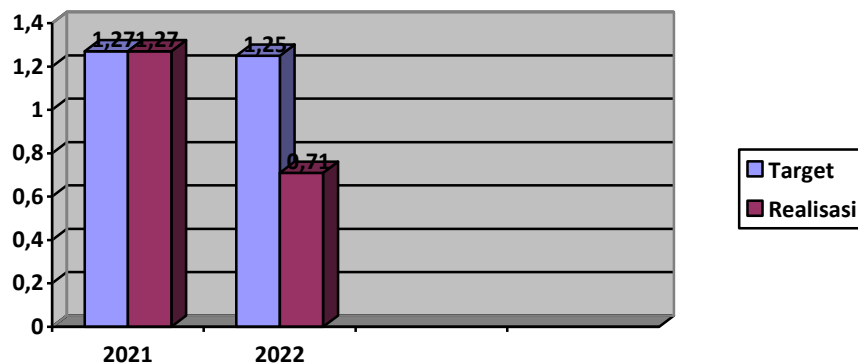
3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,27	1,27	1,25	0,71	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), target tahun 2022 sebesar 1,25 realisasi 0,71 atau tercapai 176,06%.

Grafik 4
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Persentase laju pertumbuhan penduduk terjadi penurunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perpindahan (migrasi). Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan pagu dana sebesar Rp. 3.595.000, Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan pagu dana sebesar Rp. 125.360.000, Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan pagu dana sebesar Rp. 4.375.000, Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan pagu dana sebesar Rp. 25.000.000, Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan pagu dana sebesar Rp. 70.640.000, Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan pagu dana sebesar Rp. 202.800.000, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan pagu dana sebesar Rp. 526.839.000, Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000, Kegiatan Pendaayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan pagu dana sebesar Rp. 876.821.400, Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan pagu dana sebesar Rp. 37.647.700, Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan pagu dana sebesar Rp. 502.405.600, Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan pagu dana sebesar Rp. 38.245.000, Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKB di Kampung KB dengan pagu dana sebesar Rp. 467.800.000, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan pagu dana sebesar Rp. 1.779.380.400,-.

Dokumentasi terkait indikator kinerja sebagaimana diatas sebagai berikut :

Gambar III.11
Audit kasus stunting



Gambar III.12
Audit kasus stunting



Gambar III.13
Mini Lokakarya



Gambar III.14
Penyuluhan bagi calon pengantin



Gambar III.15
Pendampingan TPK Baduta



Gambar III.16
Pendampingan TPK Ibu Hamil



Gambar III.17
Pelayanan KB MKJP



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 20220	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai AKIP		68	68	68	69	
2.	Nilai IRB				16	50	
3.	Nilai IKM				85	85	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak target tahun 2022 adalah dengan nilai 68 (B) realisasi 69 (B) atau tercapai 101, 47%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (AKIP) adalah dokumen yang bersisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah unruk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh nilai 69 dengan kategori B, (Baik) dengan pengertian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, dengan catatan evaluasi sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Agar rencana kinerja tahunan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

B. Pengukuran Kinerja

Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari eselon IV keatas dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar laporan kinerja hanya berisikan tentang info tentang upaya efisiensi yang dilakukan, sehingga mengarah pada efisiensi dan besaran efisiensi yang telah dikuantifikasikan
2. Agar informasi kinerja dalam laporan kinerja sepenuhnya dapat diandalkan dengan data realisasi kinerja yang valid
3. Agar informasi kinerja dalam laporan kinerja sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan
4. Agar informasi kinerja pada laporan kinerja sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
5. Agar informasi kinerja sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja periode berikutnya
6. Agar informasi kinerja sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja

D. Evaluasi Internal

1. Agar pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dilakukan secara bulanan
2. Agar pemantauan rencana aksi memberikan alternatif perbaikan
3. Agar hasil evaluasi program ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi untuk pelaksanaan program dimasa akan datang
4. Agar hasil evaluasi rencana aksi sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

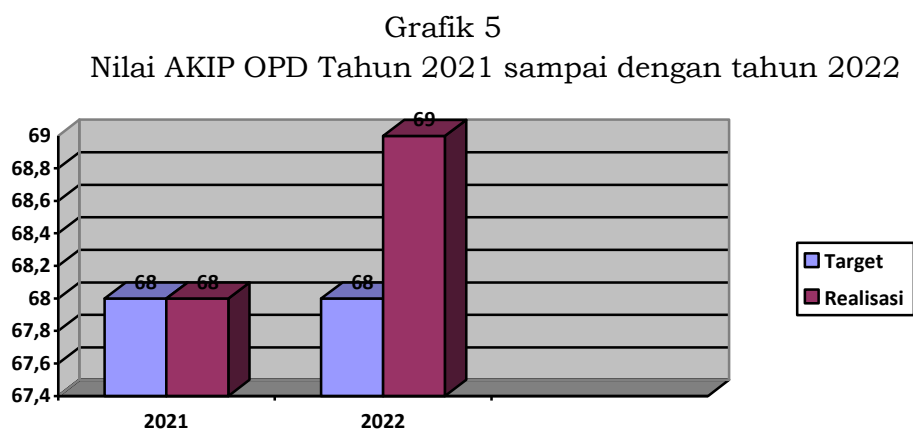
1. Agar capaian kinerja tahun berjalan 100% yang melebihi tahun sebelumnya
2. Agar informasi mengenai kinerja sepenuhnya diperoleh dari perhitungan yang valid dan sumber data yang kompeten

F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang Belum ditindaklanjuti

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi LkjIP Tahun 2020.

Nilai AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator Kinerja 2 : Nilai IRB (Indeks Reformasi Birokrasi), Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum melakukan PMPRB, sehingga hasil yang dipakai sebagai realisasi evaluasi adalah nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai laporan ini dibuat, nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota belum keluar tapi memperoleh predikat “CC”. Sementara menunggu nilai IRB Kabupaten, nilai yang dipakai adalah range terendah untuk predikat “CC” yaitu 50. Target IRB Dinas

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 adalah 16 dan realisasi 50 atau tercapai sebesar 312,5%.

Indikator kinerja 3 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka, skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Target IKM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 adalah 85 dan realisasi 85 atau tercapai 100%.

Ketiga Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu dana Rp. 3.317.333.621

D. ANALISIS EFISIENSI

Realisasi anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis tahun 2022

No	Program / Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	242.000.000	259.000.000	258.296.400	99,73	Efisiensi
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	17.717.000	66.607.500	44.546.000	66,88	Efisiensi
III.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	52.950.300	52.950.300	52.949.400	100	Efisiensi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

IV.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	7.095.800	7.095.800	7.049.800	99,35	Efisiensi
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	10.108.100	140.954.300	91.285.000	64,76	Efisiensi
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.956.840.852	3.317.333.621	3.262.761.602	98,35	Efisiensi
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	128.955.100	128.955.000	126.745.742	98,29	Efisiensi
VIII.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.843.525.100	2.792.573.700	2.529.448.003	90,58	Efisiensi
IX.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.739.330.400	1.779.380.400	689.264.900	38,74	

E. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. 8.544.850.621,- (Delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.062.346.847,- (Tujuh milyar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 82,65% dan realisasi fisik sebesar 90,15%. Realisasi fisik tidak tercapai 100% karena pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, UPPKS) realisasi keuangan tercapai 38,74% dan realisasi fisik 55%, hal ini disebabkan kegiatan pembekalan/pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada pada setiap nagari baru terlaksana pada bulan Juli dan Agustus 2022 (Jadwal ditentukan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Barat), sehingga pencairan dana pulsa baru bisa dilaksanakan mulai bulan Agustus 2022, demikian juga dana kegiatan surveillance dan honorarium TPK (Tim Pendamping Keluarga) baru bisa optimal dicairkan pada bulan Agustus 2022.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	DPA Awal	DPA Perubahan	Realisasi Perubahan	Persentase Realisasi
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	242.000.000	259.000.000	258.296.400	99,73
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	9.999.900	100
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	5.857.500	5.857.500	8.857.400	100
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2.622.500	2.622.500	2.622.500	100
1.1.3	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	222.000.000	239.000.000	238.296.500	99,71
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	222.000.000	239.000.000	238.296.500	99,71
1.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
1.3.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	17.717.000	66.607.500	44.546.000	66,88
2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17.717.000	40.329.500	39.008.000	96,72
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.658.500	28.271.000	27.072.500	95,76
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.058.500	12.058.500	11.935.500	98,98
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	26.278.000	5.538.000	21,07
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	26.278.000	5.538.000	21,07
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
III.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	52.950.300	52.950.300	52.949.400	100
3.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.950.300	52.950.300	52.949.400	100

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

3.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	51.000.300	51.000.300	50.999.400	100
3.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100
IV.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	7.095.800	7.095.800	7.049.800	99,35
4.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4.850.000	4.850.000	4.806.000	99,09
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.750.000	2.750.000	2.706.000	98,40
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.245.800	2.245.800	2.243.800	99,91
4.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.108.800	1.108.800	1.108.800	100
4.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530.000	530.000	530.000	100
4.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	607.000	607.000	605.000	99,67
4.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	10.108.100	140.954.300	91.285.000	64,76

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

5.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4.928.100	27.374.100	27.206.600	99,39
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.240.600	4.240.600	4.240.600	100
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	687.500	23.133.500	22.966.000	99,28
5.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.540.000	74.763.000	25.932.500	34,69
5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4.540.000	74.763.000	25.932.500	34,69
5.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	640.000	38.817.200	38.145.900	98,27
5.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota		38.177.200	37.505.900	98,24
5.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	640.000	640.000	640.000	100
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.956.840.852	3.317.333.621	3.262.761.602	98,35

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.210.000	4.210.000	4.179.000	99,26
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.105.000	2.105.000	2.087.000	99,14
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.105.000	2.105.000	2.092.000	99,38
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.741.752	2.761.784.021	2.709.662.116	98,11
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.610.206.252	2.759.248.521	2.707.126.616	98,11
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.535.500	2.535.500	2.535.500	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.249.400	182.862.400	182.819.261	99,98
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.983.400	19.983.400	19.981.700	99,99
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	18.015.000	18.015.000	18.015.000	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-			
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.980.000	3.025.000	3.025.000	100
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.271.000	141.839.000	141.797.561	100

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
1.5.1	Pengadaan Mebel	-	-	-	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.479.700	258.122.200	255.951.309	99,15
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	300.000	300.000	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.199.700	16.742.200	14.679.309	87,68
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.080.000	241.080.000	240.972.000	99,96
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.160.000	110.355.000	110.149.916	99,81
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.190.000	103.585.000	103.379.916	99,80
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.970.000	6.770.000	6.770.000	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	128.955.100	128.955.000	126.745.742	98,29
2.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	128.955.100	128.955.000	126.745.742	98,29
2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.595.000	3.595.000	3.595.000	100
2.1.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	125.360.000	125.360.000	123.150.742	98,24
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.843.525.100	2.792.573.700	2.529.448.003	90,58

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

3.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	920.605.700	869.654.000	743.925.434	85,54
3.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.375.000	4.375.000	100
3.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.640.000	60.878.220	86,18
3.1.4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	202.800.000	202.800.000	153.950.000	75,91
3.1.5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	577.790.700	526.839.000	465.472.214	88,35
3.1.6	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	34.250.000	85,63
3.3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	876.821.400	876.821.400	855.740.369	97,60
3.3.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	876.821.400	876.821.400	855.740.369	97,60
3.4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.046.098.000	578.298.300	462.018.400	79,89
3.4.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37.647.700	37.647.700	37.001.700	98,28
3.4.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	502.405.600	502.405.600	390.144.200	77,65
3.4.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.245.000	38.245.000	34.872.500	91,18
3.5	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	467.800.000	467.800.000	467.763.800	99,99

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
3.5.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKB di Kampung KB	467.800.000	467.800.000	467.763.800	99,99
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.739.330.400	1.779.380.400	689.264.900	38,74
4.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.739.330.400	1.779.380.400	689.264.900	38,74
4.1.1	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.739.330.400	1.779.380.400	689.264.900.	38,74
	Jumlah	7.998.522.652	8.544.850.621	7.062.346.847	82,65

Berikut ini disajikan beberapa prestasi yang diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1. Penghargaan Perempuan Bidang Sosial Budaya dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju
2. Penghargaan sebagai Perempuan Berjasa dan Berprestasi untuk Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 oleh Gubernur Sumatera Barat
3. Terbaik I Kategori Kabupaten Pelaksanaan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Dalam Rangka Harganas XXIX Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
4. Terbaik I Kategori Lomba Poster Digital Dalam Rangka Harganas XXIX Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan bentuk media pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan sarana introspeksi diri yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja bahwa 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum adalah sebesar 118,86% sehingga dapat dikategorikan sangat tinggi.

Selama Tahun Anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 9 program, 22 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 47 dengan total anggaran sebesar Rp. 8.544.850.621. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga pencapaian realisasi fisik 90,15% dan realisasi keuangan sebesar 82,65 %.

Untuk indikator kinerja yang belum memenuhi target pada tahun 2022, diupayakan agar tahun berikutnya dapat terpenuhi dan mengevaluasi kembali target indikator kinerja tersebut.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk pencapaian target dan sasaran Program KB, maka tetap perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum-momentum strategis antara lain : Bulan Bhakti IpeKB, Operasional Bhakti IBI, TNI Manunggal KB Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan serta momen-momen khusus lainnya.
2. Mengoptimalkan peran Kampung KB dimana Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program KKBPK (Kepedudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan
3. Peningkatan kualitas serta profesionalitas tenaga pelayanan KB dan operasional Balai Penyuluhan KB melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB
4. Peningkatan intensitas sosialisasi terkait regulasi perlindungan perempuan dan anak
5. Meningkatkan dukungan dan komitmen gugus tugas KLA untuk dapat mewujudkan Lima Puluh Kota Layak Anak
6. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kode Pos 26271
Telp. No. (0752) 7754181 Fax. No. (0752) 7754181

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIA MASNA, SKM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima
Puluh Kota

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sarilamak, November 2022

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YULIA MASNA, SKM
NIP. 19780704 200212 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	0,0036
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0036
3.	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	68
		4.2 Nilai IRB	16
		4.3 Nilai IKM	85

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 17.000.000.-	
2. Perlindungan Perempuan	Rp. 48.890.500.-	
3. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 52.950.300.-	
4. Pemenuhan Hak Anak	Rp. 7.095.800.-	
5. Perlindungan Khusus Anak	Rp. 140.954.300.-	
6. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.317.333.621.-	
7. Pengendalian Penduduk	Rp. 128.955.000.-	
8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.792.573.700.-	
9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.779.380.400.-	
J U M L A H	Rp. 8.544.850.621.-	

Sarilamak, November 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

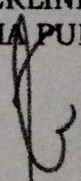
YULIA MASNA, SKM
NIP. 19780704 200212 2 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	0,0036
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0036
3.	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	68
		4.2 Nilai IPB	16
		4.3 Nilai IKM	85

Sarilamak, Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes
 NIP. 19630910 199101 2 001

Lampiran ; Prestasi yang diperoleh Tahun 2022



